



DEOTORISASI WACANA KUASA HABA TENGGU PASCA MODERNISASI DAYAH DI ACEH

Mohd. Nasir¹, Syamsul Rizal², M. Wali Al-Khalidi³
^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia
mohd.nasir@iainlangsa.ac.id

DOI : <http://dx.doi.org/10.30829/tar.v30i1.2502>

ARTICLE INFO

Article History

Received : May 10, 2023

Revised : June 26, 2023

Accepted : June 30, 2023

Keywords

*Deauthorization,
haba tengku,
modernization of the dayah.*

ABSTRACT

This paper discusses the de-authorization of discourse on the power of “haba tengku”(Tengku said) after dayah modernization in Aceh. Implication of modernization, the authority of the “haba tengku” has faded so it is not based on “kiban kheun tengku”. This paper aims to describe the authority of haba Tengku be faded the modernization and furthermore, the described haba Tengku is analyzed with Michel Foucault’s theory. Research on dayah in Aceh reveals the strong authority of discourse on the power of haba Tengku. But so far, studies that address this theme have not paid sufficient attention of weakening of discourse authority of haba Tengku after entering school at the dayah institution. This is qualitative research which data collection through observation, interview and documentation, analyzed through Michel Foucault's theory. This article concludes that: First, changes in power relations in dayah have led changes of power space. Second, this episteme is formed through three discursive stages, namely: positivity with an agreement between tengku and government, a priori historically looking at the terms and conditions that must be carried out by dayah institution carrying out modernization and archives of the regulations must be carried out by stakeholder of dayah institution.

Pendahuluan

Munculnya lembaga pendidikan formal/sekolah yang beroperasi di dayah telah mengubah konsep dan model kurikulum pembelajaran di dayah. Konsep dan model kurikulum dayah salafiah yang bersifat turun temurun, berorientasi “*kiban khen tengku*”, (Mustakim et al., 2021) telah tergerus oleh ketentuan pemerintah. Dulu, haba tengku menentukan semua jenis aktifitas pendidikan dan praktek ibadah di dayah, (Ziemek, 1986), baik yang bersifat individual maupun sosial. Semuanya ditentukan oleh haba tengku melalui peraturan dayah, materi pembelajaran kitab safinatunnajah, awamil, zamon, taisir akhlaq, ‘aqidatul Islamiyah bagi tingkat pemula, dan hukuman seumanoe, cuko oek, bagi mereka yang melanggar peraturan

dayah. (Prasetyo et al., 2020). Namun kini, kalender akademik pendidikan formal lebih dipergunakan dayah modern dari pada haba tengku. (Kahar & Barus, 2021). Legitimasi haba tengku tidak lagi memiliki otoritas terhadap pendidikan formal yang berada dalam dayah. Kurikulum pembelajaran dayah harus sejalan dengan kurikulum yang dianjurkan oleh Kemenag/ Kemendikbud. Tengku dayah harus mengikuti pemerintah dalam menjalankan pendidikan formal di lembaga pesantren. Pendirian sekolah dalam lembaga pendidikan dayah merupakan titik awal terjadinya deotorisasi haba tengku di dayah modern.

Studi dengan tema ini layak mendapat perhatian, berdasarkan studi kasus masyarakat Aceh pada umumnya menjadikan dayah sebagai lembaga pendidikan sakral yang melahirkan cendekiawan shalih (ulama) yang memiliki otoritas dalam dinamika sosial kehidupan masyarakat Aceh, pemimpin keislaman Aceh, (Kausar, 2020), (Nirzalin Armia, 2014). Berdasarkan literature review diketahui bahwa kecenderungan studi tentang tengku (kiyai) dayah lebih berfokus kepada metode pembelajaran, (Kausar, 2020), tujuan pembelajaran, (Fakhrurrazi & Sebgag, 2020), sejarah pembelajaran kitab kuning dari masa ke masa (Rasyidin, 2017), Budaya Akademik dayah (kurikulum, metode pengajaran organisasi) (Qurtuby et al., 2013), (Silahuddin, 2015), peran kiyai (tengku) dalam mencegah radikalisme di pesantren (Marzuki et al., 2020), Model moderasi pendidikan pesantren (Khojir, 2020), Model kepemimpinan kiyai syuro partisipatif (Mustakim et al., 2021) Pengaruh ulama Aceh pada masa orde baru dan kekuasaannya (Ichwan, 2011) .

Penelitian dan tulisan terdahulu tentang dayah dan tengku di Aceh hanya memfokuskan dayah sebagai pendidikan di Aceh, metode yang digunakan, materi belajar, kitab yang dipakai, serta tengku yang dipandang sebagai pemimpin dan bentuk kepemimpinannya. Artikel ini mendeskripsikan otoritas haba tengku yang telah memudar seiring dengan adanya modernisasi. Pada awalnya haba tengku sebagai pemegang kuasa mutlak dalam semua aktifitas dayah, kurikulum, model, metode, dan beragam kegiatan lainnya, semuanya “*lage haba tengku*”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif field research (penelitian lapangan), yaitu: “metode untuk meneliti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang (Miles et al., 2018). Pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi tidak terstruktur yaitu dengan cara pengamatan tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

(Miles et al., 2018). Peneliti melakukan observasi pada bulan maret sampai dengan bulan mei tahun 2023. Observasi dilakukan di dayah Samalanga, Aceh Utara dan Aceh Timur. Pengumpulan data dalam artikel ini juga menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan teknik tidak berstandar (unstandardized interview) dan tidak berstruktur (unstructured interview). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada alumni santri dayah dan pimpinan dayah di Aceh. Wawancara dengan santri untuk mengetahui haba tengku serta ketaatan santri terhadap haba tengku dan tradisi dayah yang mereproduksi dayah kembali setelah menyelesaikan pendidikan di dayah.

Data yang dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif berdasarkan teknik yang ditawarkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman. Menurutnya, analisis data mencakup tiga kegiatan, yaitu: reduksi data (data reduction), display data (display data), dan verifikasi atau kesimpulan (conclusion drawing or verification).

Menggunakan kerangka teori yang dijelaskan oleh Michel Foucault penulis mendeskripsikan ruang kuasa haba tengku dalam instansi pendidikan non formal (dayah). Foucault menyatakan bahwa kekuasaan terjadi disebabkan oleh dua hal pertama pengetahuan kebenaran yang memberikan sebuah wacana, wacana tersebut nantinya akan membentuk sebuah rezim kekuasaan. Kedua kekuasaan terbentuk melalui episteme yang terbentuk melalui diskursif, diskursif terbentuk melalui dari tiga konsep positivitas, apriori historis, arsip (FOUCAULT, 1980).

Hasil

Penelitian ini dilakukan pada dayah salafiah yang tidak memiliki legalitas terhadap kebijakan pemerintahan yakni seperti Dayah Darul Huda Lueng Angen, Lhok Nibong Aceh Utara, santri yang terus bertambah setiap tahunnya, sekalipun mereka tidak mendapatkan legalitas yang diakui oleh pemerintahan, hal ini menjadi magnet peneliti menjadikan dayah Darul Huda sebagai lokus penelitian. Di dayah salafiah ini penulis menemukan karakteristik santri yang tidak melakukan resitensi terhadap haba tengku seperti ketika mereka terlambat ke masjid, terlambat ke bale beut mereka akan mendapatkan sangsi lage khen tengku, patuh dan taat terhadap haba tengku tanpa adanya bantahan menjadi sebuah kajian yang penulis tanyakan langsung kepada tengku dayah salafiah di lhoknibong dengan jawaban “*bahwa “Jameun mandum but lam dayah lage gepegah le tengku, cara murunoe lage khen tengku, pu kitab yang tabeut lage gepegah le tengku.”*.”(Abaty Lueng Angen, 2023)

Disisi lain peneliti mengunjungi dayah salafiah yang telah bertransformasi menjadi dayah modern, seperti dayah Malikussaleh Panton Labu Aceh Utara hal ini peneliti lakukan untuk dapat melihat sejauh mana peran haba tengku pada dayah salafiah dan dayah modern. Karakteristik santri pada dayah modern memiliki kesamaan dengan dayah salafiah dimana mereka sama – sama patuh dan taat terhadap lembaga dayah, hanya saja kepatuhan santri pada dayah modern lebih di pengaruhi oleh sangsi regulasi, mereka tidak akan mendapatkan kelulusan dan ijazah apabila sering melanggar peraturan dayah seperti pernyataan tengku Karim “*Aneuk mit nyou menyou hana di pateh kiban yang kamoe pegah, hana lulus dan hana ijazah, dan hanjet di sambong sikula pat laen, sebab aneuk mitnyou menyou hana dipateh peraturan hanjet ikot ujian sebab taikot lage khen pemerintah, kurikulum ngen model pembelajaran tanyou siatnyou kiban khen pemerintah*” (Tengku Karim, 2023). Dayah modern dan salafiah memiliki ruang kuasa yang berbeda terhadap kepatuhan para santri.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan pada dayah salafiah dan modern serta dengan mewawancarai tengku dayah pada dua instansi tersebut penulis menemukan sebuah hasil bahwa “Haba tengku dulunya memiliki otoritas mutlak dalam instansi dayah”. Wacana pengetahuan kebenaran telah memberikan legitimasi ruang kuasa tengku kepada pemerintah, disebabkan terjadinya perubahan relasi kuasa di lembaga dayah, yaitu: Pertama, perubahan ruang kuasa. Hasil yang penulis deskripsikan juga dikemukakan oleh Isard dia menyatakan bahwa “Haba tengku dayah salafi yang dulunya memiliki ruang kuasa absolut bersifat horizontal (capital division of powers) dan vertikal (areal divison of power)” (Isard, 2012). Semua aktifitas dayah “lage khen tengku”, kini kuasa haba tengku menjadi relative, kekuasaan hanya ditempatkan pada peraturan tertentu.

Kedua, perubahan kebijakan. Pembagian ruang kuasa melahirkan kebijakan baru sesuai episteme yang dibentuk. Haba tengku dulunya memiliki hak otonom terhadap peraturan dan kegiatan pendidikan yang dilakukan santri di dayah (Qurtuby et al., 2013). Ia memiliki keputusan mutlak (standing decision) (Dunn, 2015). Keputusan haba tengku saat ini menjadi moderat yaitu dengan mengikuti kurikulum dari pemerintah dan berdasarkan hasil musyawarah (Mustakim et al., 2021)

Ketiga, perubahan model. Episteme pemerintah melalui kurikulum pendidikan formal di dayah, telah mengubah model Pendidikan dayah. Dulu, dayah hanya memiliki model pendidikan “lage khen tengku” semua metode pembelajaran di dayah berdasarkan haba tengku, (Afriansyah, 2016). Episteme memberikan pergeseran terhadap ruang kuasa haba tengku, metode dan model pembelajaran formal di dayah tidak lagi mengacu kepada haba tengku

(Kahar & Barus, 2021). selain itu episteme juga memberikan modernisasi bagi lembaga pendidikan dayah dengan mengadopsi pendidikan umum (Arifin & Rahmi, 2020) yang menyebabkan pergeseran ruang kuasa haba tengku.

Deotorisasi wacana kuasa haba tengku pasca modernisasi dayah terlihat dari episteme yang terbentuk melalui tiga tahapan diskursif, yaitu: Positivitas, sebuah kesepakatan pemahaman antara tengku dengan pemerintah terhadap pendidikan modern dilembaga dayah, apriori historis, syarat dan ketentuan regulasi pemerintah yang harus dijalankan oleh tengku dayah pasca modernisasi pendidikan dalam lembaga dayah, dan arsip: kewajiban menjalankan realisasi peraturan oleh stackholder lembaga dayah sesuai dengan perjanjian dan syarat yang telah disepakati.

Pembahasan

Ruang Kuasa Haba Tengku

Wacana rezim dan kebenaran yang bersifat esensial dalam peristiwa dan kegiatan kebudayaan memberikan ruang kuasa bagi mereka yang memiliki kebenaran (Michel Foucault, 1980). Kebenaran bukan hanya milik seorang akan tetapi kebenaran merupakan milik mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Kebenaran mutlak di dayah milik tengku karena tengku dayah memiliki pengetahuan serta ilmu pengetahuan agama yang mendalam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ardhia;

Tengku kami memiliki pengetahuan yang luar biasa, seakan semua hal yang berkaitan dengan agama, semuanya ia ketahui. Ini terlihat sewaktu kami bertanya dengan tengku, tengku menjawab dengan menyebutkan referensi kitabnya. Sehingga haba tengku memberikan legalitas kekuasaan yang diikuti tanpa ada bantahan (Tengku Ardhia, 2022)

Kebenaran haba tengku dayah juga memberikan kekuasaan bagi tengku dayah untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran umum serta kurikulum sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh tengku Marzuki;

Tengku dayah dapat melakukan pembelajaran dan metode belajar sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak ada yang memprotes atau mempertanyakan materi dan metode pembelajaran yang dilakukan, karena masyarakat mempercayai kebenaran tengku disebabkan pengetahuan yang dimilikinya. (Tengku Marzuki, 2022).

Namun saat ini dayah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Di sisi lain dengan adanya sekolah yang diatur dan dikelola oleh pemerintah atau pun sekolah swasta membuat otoritas dayah dan haba tengku dayah mengalami perubahan,

sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bakar; *kebenaran kurikulum pemerintah yang termuat dalam wacana undang-undang pemerintahan memberikan ruang kuasa baru di lembaga pendidikan dayah, dengan menggeser ruang kuasa tunggal yang hanya dimiliki oleh haba tengku dalam instansi dayah.* (Abubakar, 2015)

Ruang kekuasaan tengku dayah di Aceh tidak diperoleh melalui kekerasan, represi maupun pertarungan, namun diperoleh melalui rayuan, motivasi dalam bentuk reward keberkahan dan pahala bagi seseorang yang mematuhi *haba tengku* atau larangan dalam bentuk sanksi bagi seseorang yang melanggar *haba tengku* akan *teumereuka* (Tengku Ardhia, 2022). Begitu juga dengan ruang kuasa baru di dayah, ruang kuasa pemerintah di dayah bukan diperoleh melalui kekerasan, pertarungan kekuatan. Kekuasaan wacana pemerintah dan kekuasaan *haba tengku* dalam lembaga pendidikan dayah dibentuk dengan cara persuasi, untuk melakukan sebuah tindakan yang bermanfaat bagi santri pribadi atau pun masyarakat di masa sekarang atau yang akan datang.

Ruang kekuasaan tengku dayah di Aceh adalah ruang kuasa negatif. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Foucault, bahwa kekuasaan memberikan dua ruang yang berbeda, positif dan negative. Ruang kuasa negative dalam pandangan Foucault tidak sama seperti yang diungkapkan Rousseau, Locke, dan Hobbes yang menyatakan, kekuasaan diperoleh melalui kekerasan atau hasil suatu persetujuan, (Baker, 2012) bukan juga seperti yang disampaikan Freud dan Reich “kekuasaan melalui represi” (Reich, 2013) atau ungkapan Machiavelli “kekuasaan hasil dari pertarungan kekuatan” (Baker, 2012).

Perubahan kebijakan

Haba tengku memberikan kebenaran dalam aktifitas dayah, perkataannya sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang tengku miliki. Kebenaran *haba tengku* dapat dilihat dari manfaat tindakan yang tengku lakukan. Sehingga kebenaran *haba tengku* dapat dilihat dari perilaku dan perbuatan tengku dikarenakan *haba tengku* dayah di Aceh berelasi dengan tindakan tengku. Kekuasaan *haba tengku* sejalan dengan analisa Foucault yang menyatakan “pelaksanaan relasi kuasa mengantarkan kepada tindakan untuk mendapatkan kebenaran” (Michel Foucault, 1978). Kebenaran *haba tengku* dayah di Aceh membentuk perilaku santri dan aktifitas di dayah sesuai yang diungkapkan oleh Ichwan;

Apa yang dikatakan oleh tengku kami merukan peraturan tidak tertulis yang harus kami taati dan patuhi apa pun yang dikatakan oleh tengku, tengku kami pun melakukan apa yang dia katakan sehingga kami patuh dengan apa yang dikatakan tengku bahkan kami melakukan apa yang dilakukan tengku dikarenakan apa yang dikatakan dan dilakukan tengku adalah benar. Kami melakukan seperti tahajud tengah malam, berzikir serta

amalan sunnah lainnya untuk mendapatkan pengetahuan irfani seperti tengku. (Tengku Ikhwanuddin, 2022)

Kekuasaan haba tengku dayah di Aceh berimplikasi kepada santri yang berada di dayah atau masyarakat yang berada di sekitar dayah. Santri yang berada di dayah harus mentaati semua haba tengku dikarenakan haba tengku adalah peraturan yang tidak tertulis. Bahkan lebih dari itu, para santri mempunyai anggapan bahwa haba tengku dapat memberikan dampak positif bagi yang mentaati dan berdampak negatif baik bagi yang tidak mentaati haba tengku. Seperti yang diungkapkan Foucault pada makna kekuasaan yang positif “relasi kuasa merupakan tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lainnya melalui persuasi, rangsangan, rayuan dan paksaan. (Michel Foucault, 1980).

Kekuasaan haba tengku berupa kepatuhan santri terhadap peraturan dayah akan memberikan korelasi yang positif dalam kehidupannya (Ma'rufah et al., 2014 dan Burhan Al-Islam Al-Zarnuji, 2004). Seingga, tengku memiliki ruang kuasa absolut terhadap lembaga dayah, semua kegiatan dayah mengacu kepada haba tengku, kehadiran pendidikan formal di dayah memberikan ruang kuasa baru bagi lembaga tersebut. *Haba tengku* memiliki otoritas di dayah, dia memiliki kebijakan atas lembaga yang dia pimpin dan santri dayah juga memiliki kepatuhan totalitas terhadap haba tengku. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Wali; “*bagi kami haba tengku memberikan dampak dalam kehidupan kami, kalau kami mentaati dan melakukan apa yang dikatakan tengku atau tidak membantahnya maka kami merasakan hidup ini mendapatkan berkah, karena haba tengku membawa keberkahan dalam hidup*” (Muhammad Amin, 2022). Sedangkan paksaan merupakan sebuah kemudharatan bagi santri yang tidak mengikuti perintah tengku. (Nirzalin Armia, 2014).

Saat ini, masyarakat Aceh menganggap dayah hanya mampu membentuk generasi yang hanya menempati ranah-ranah keagamaan tertentu seperti imum syik, bile mesjid, imum dusun, tengku semeubet, pimpinan dayah, pimpinan samadiah, pimpinan majlis ta'lim, dan da'i. Tengku Dayah tidak mampu menempati ranah birokrasi dan tehnokrasi pemerintahan jikalau mereka tidak melanjutkan pendidikan umum. Perubahan persepsi masyarakat Aceh dalam pandangan Foucault disebabkan adanya perubahan pengetahuan yang ada pada masyarakat saat itu sesuai perkembangan zaman (Michel Foucault, 1978).

Episteme ini memberikan ruang bagi dayah untuk melakukan modernisasi, modernisasi yang dilakukan dayah tidak spontanitas, dari yang notabnya salafiah langsung bisa berubah menjadi modern (Ikhsan, 2022). Perubahan ini dilakukan melalui tahapan diskursif. Tahapan

diskursif memberikan sebuah wacana, penyebaran wacana memberikan penilaian tentang kebenaran, kebenaran yang benar melalui sebuah wacana membentuk sebuah rezim yang berkuasa. (Michel Foucault, 1980). Diskursif yang terjadi pada dayah adalah dengan adanya pemahaman kepada para santri dan wali santri tentang pentingnya pendidikan umum yang harus dimiliki santri dayah, agar santri dayah nantinya tidak hanya menempati ranah keagamaan semata, tapi juga mampu berada dalam ranah pemerintahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mudi;

“pada awalnya dayah hanya mempelajari ilmu agama semata tanpa adanya pemahaman ilmu umum, modernisasi dayah merupakan hal yang tidak dapat dielakkan terlebih lagi ada pendapat yang menyatakan, *u’lumuu auladikum lizamanihim la lizamanikum*. Oleh karena itu, perlu dipelajari perkembangan dunia ini, sehingga anak didik harus diberikan pengetahuan sesuai dengan perkembangan mendatang, tidak hanya ilmu keagamaan saja akan tetapi mampu menempatkan diri dalam dunia pemerintahan”. (Aby Mudi, 2022)

Terjadinya diskursif pada dayah di Aceh berimplikasi kepada ruang kuasa haba tengku yang tidak lagi berada dipuncak. Para tengku yang tidak memahami ilmu umum, harus mengikuti arah dan kebijakan pemerintah agar mendapatkan kebenaran tentang ilmu pengetahuan umum yang diajarkan di lembaga dayah. Tengku menjalankan kurikulum dan metode pendidikan umum di dayah dengan mengacu kepada peraturan pemerintah.

Model yang berubah

Haba tengku memiliki relasi kuasa terhadap metode pendidikan dayah yang bersifat salafiah. Hal ini dikarenakan dayah merupakan sebuah lembaga yang hanya mengajarkan pendidikan agama (*ukhrawi*) semata tanpa pengetahuan umum (*duniawi*). Dayah mengajarkan pengetahuan tentang cara mengerjakan ibadah yang benar sesuai dengan tuntutan syariat termuat dalam kitab kitab klasik yang dipelajari di dayah. Untuk memahami teks kitab klasik tersebut dibutuhkan metode memahami kitab klasik berdasarkan “*haba tengku*”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Faisal;

Dayah di Aceh sejak dulu hanya mengajarkan pendidikan agama saja, tidak ada mengajarkan materi pendidikan umum, maksudnya pendidikan di dayah tidak ada pendidikan matematika, bahasa Inggris, atau biologi. Semua yang diajarkan adalah pelajaran agama, santri dayah dididik untuk siap menjadi tokoh agama bagi masyarakat dan menjadi tempat masyarakat mencari solusi dan pengetahuan tentang agama. (Tengku Faisal, 2022)

Metode memahami kitab merupakan pengetahuan mutlak yang dimiliki tengku, hanya tengku dayah yang memiliki otoritas dan kuasa atas kurikulum pendidikan pada dayah salafiah,

(Michel Foucault, 1980). Metode yang diterapkan tengku berorientasi pada kesadaran diskursif, limitasi, seleksi dan kontrol. Kitab yang dipelajari di dayah terdapat kitab berbaris yang hanya dikhususkan bagi santri pemula. Kedua kitab kitab arab gundul, yang tidak memiliki baris, bagi santri yang sudah 3-4 tahun berada di dayah, sehingga santri mampu memahami qadiah (*premis*) dan *natijah* (konklusif), qawaid ushul fiqih, memahami pembahasan fiqih, tauhid, dan tasawuf, (Fakhrurrazi & Sebgag, 2020).

Haba tengku pada kurikulum dayah yang menjadi kebenaran mutlak memproduksi kebenaran berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan alumni dayah yang akan memproduksi dayah berikutnya, sebuah tradisi dayah alumni dayah yaitu akan mendirikan dayah kembali. Fenomena ini dalam pandangan Michel Foucault, kebenaran tidak terbentuk melalui sebuah konsep yang bersifat abstrak, kebenaran memproduksi kebenaran itu sendiri (Michel Foucault, 1980). Haba tengku mereproduksi pengetahuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Zulfikar;

Saya belajar di dayah MUDI Samalanga selama tujuh tahun dan saya melanjutkan pendidikan strata satu di Samalanga juga. Setelah saya keluar dari dayah dan saya pulang ke gampong halaman, saya mendirikan dayah juga. Apa yang saya sampaikan dan ajarkan di dayah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tengku saya di dayah. Saya tidak berani melawan atau bertentangan dengan apa yang diajarkan tengku kepada saya. Saya juga menggunakan kitab-kitab yang dipakai pada dayah saya dulu. Kesesuaian antara dayah saya dengan dayah saya belajar dulu juga pada nama seperti Al- Aziziyah, (Tengku Zulfikar, 2022).

Selain tengku dayah yang memiliki kekuasaan dengan haba tengkunya, kebenaran juga dimiliki oleh pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemenag dan Kemendikbud terhadap kurikulum yang mereka terapkan untuk pendidikan formal, (Wahab, 2019). Pemerintah memiliki relasi kuasa tentang model dan metode pembelajaran bagi lembaga pendidikan formal, pengetahuan kebenaran yang dimiliki pemerintah membuat pemerintah memiliki kuasa terhadap lembaga pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidikan umum di dayah telah memberikan ruang kuasa bagi pemerintah untuk dapat mengatur metode pembelajaran sesuai dengan kebenaran wacana pemerintah, seperti pada jenjang pendidikan, materi belajar, metode serta evaluasi pembelajaran.

Kebenaran pengetahuan dan wacana memberikan legitimasi kekuasaan, tidak ada kebenaran tanpa kekuasaan, dan tidak ada kekuasaan tanpa kebenaran, (Michel Foucault, 1980) kebenaran tengku dengan metode pembelajaran kitab kuning memberikan ruang legitimasi untuk dia berkuasa melalui habanya dimana semua peraturan dan aturan dayah sesuai dengan

perintahnya, (Muhammad Amin, 2022) namun disisi lain ketika dayah telah melakukan modernisasi dengan memberikan ruang bagi pendidikan formal di dalam pendidikan non formal, kebenaran pemerintah dengan kurikulum dan metodenya memberikan legalitas kepada pemerintah untuk berkuasa terhadap pendidikan formal yang berada dalam pendidikan dayah.

Kebijakan pemerintah terhadap kurikulum lembaga pendidikan formal disusun dengan baik melalui rumusan-rumusan yang akurat, kemudian dimapankan dan diwujudkan dengan pemberitahuan kebenaran, selanjutnya menghasilkan sebuah wacana. Foucault menyebutkan bahwa wacana nantinya akan memberikan kebenaran dan pengetahuan bagi santri yang menjalankan serta akan menimbulkan efek kuasa (Michel Foucault, 1980), pemerintah memiliki kuasa dalam menentukan kurikulum pendidikan formal sekalipun lembaga pendidikan formal tersebut berada di instansi pendidikan non formal.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pertama, deotorisasi kuasa haba tengku dikarenakan munculnya kebenaran wacana baru dalam paradigma modernisasi lembaga pendidikan dayah. Deotorisasi haba tengku ini terjadi karena adanya perubahan relasi kuasa di dayah yang telah memunculkan perubahan ruang kuasa. Pengetahuan pemerintah yang memberikan kebenaran wacana baru telah mendapatkan ruang kuasa dengan melakukan perubahan kebijakan dan model pembelajaran dayah pasca modernisasi. Kedua, episteme ini pun terbentuk melalui tahapan diskursif, yaitu: positivitas (kesepakatan antara tengku dengan pemerintah), selanjutnya tahap, apriori historis (syarat dan ketentuan yang harus dijalankan lembaga dayah yang melakukan modernisasi) dan tahap arsip (peraturan yang harus dijalankan oleh stackholder lembaga dayah). Saran dari artikel ini pertama, tengku harus beradaptasi terhadap perkembangan pengetahuan di era globalisasi, tidak adanya dikotomi pendidikan bagi para tengku dayah dengan memisahkan pengetahuan umum dan agama. Kedua pemerintah memberikan ruang kuasa bagi para tengku dayah: alumni dayah menjadi bagian dari pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Abaty Lueng Angen. (2023). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Abubakar, M. (2015). *PESANTREN DI ACEH: Perubahan, Aktualisasi, dan Pengembangan*.
Kaukaba. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=DNKREAAAQBAJ>

- Aby Mudi. (2022). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Afriansyah, M. R. (2016). Dampak Peraturan Gubernur Aceh Nomor 451.2/274/2003 Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah, *15*(2), 177–212.
- Arifin, Z., & Rahmi, S. (2020). CHARISMATIC-VISIONARY LEADERSHIP OF TEUNGKU IN DEVELOPING THE ROLE OF DAYAH MUDI MESRA SAMALANGA , BIREUN , *18*(1), 139–154.
- Baker, E. (2012). *Social Contract, Essays by Locke, Hume and Rousseau*. Read Books Limited. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=HsF8CgAAQBAJ>
- Burhan Al-Islam Al-Zarnuji. (2004). *Ta’lim Al-Muta’alim Thariq Al-Ta’allum*.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis*. Taylor & Francis. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=4fI5CgAAQBAJ>
- Fakhrurrazi, F., & Sebgag, S. (2020). Methods of Learning Kitab Kuning for Beginners in Islamic Boarding School (Dayah). *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(3), 296–310. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i3.838>
- FOUCAULT, M. (1980). *Power/Knowledge*. New York: Partheon Books.
- Ikhsan, T. (2022). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Isard, W. (2012). *History of Regional Science and the Regional Science Association International: The Beginnings and Early History*. Springer Berlin Heidelberg. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=94UECAAQBAJ>
- Kahar, S., & Barus, M. I. (2021). *Merengkuh Modernisasi : Pengalaman Yayasan Pendidikan Islam Al Aziziyah Samalanga*. madina publisher. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=qbRZEAAAQBAJ>
- Kausar, M. (2020). Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Dayah Ma’had Al - ‘Ulūm Dīniyyah Al - Islāmiyyah Mesjid Raya Mudi Mesra, *7*(1), 24–35.
- Marzuki, Miftahuddin, & Murdiono, M. (2020). Multicultural education in salaf pesantren and prevention of religious radicalism in Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, *39*(1), 12–25. <https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.22900>
- Michel Foucault. (1978). *Dicipline and Punish The Birth of The Prison*. London: Penguin Classic.
- Michel Foucault. (1980). *Power/Knowledge*. New York: Partheon Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=fjh2DwAAQBAJ>

- Muhammad Amin. (2022). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Mustakim, M., Salim, A., Rouzi, K. S., Rusiyono, R., & Nurmaida, D. K. (2021). The Syuro-Participative Leadership in Al-Qur'an-Based Pesantren in the Disruption Era. *Ta'dib*, 24(2), 15. <https://doi.org/10.31958/jt.v24i2.3069>
- Nirzalin Armia. (2014). Teungku Dayah Dan Kekuasaan Panoptik. *Substantia*, 16(1), 13–34.
- Prasetyo, M. A. M., Bashori, B., & Masriani, M. (2020). Model Capacity Building Pada Pesantren Perbatasan Binaan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(1), 71–96. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v14i1.71-96>
- Qurtuby, S. Al, Darmadi, D., & Srimulyani, E. (2013). Islamic Schooling in Aceh: Change, Reform, and Local Context, 20(3).
- Rasyidin, A. (2017). Pembelajaran Kitab Kuning Di Pesantren Musthafawiyah, Mandailing Natal. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 1(1), 41–67. <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i1.324>
- Reich, W. (2013). *Reich Speaks of Freud: Wilhelm Reich Discusses His Work and His Relationship with Sigmund Freud*. Farrar, Straus and Giroux. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=i8B40zU3Y0cC>
- Silahuudin. (2015). Transformasi Budaya Pendidikan Dayah di Aceh. *Jurnal MUDARRISUNA*, 5(2), 377–413. Diambil dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/634>
- Tengku Ardhia. (2022). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Tengku Faisal. (2022). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Tengku Ikhwanuddin. (2022). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Tengku Karim. (2023). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Tengku Marzuki. (2022). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Tengku Zulfikar. (2022). *Wacana Kuasa Haba Tengku*. Indonesia.
- Wahab, R. (2019). *Menjawab Persoalan Pendidikan di Era Reformasi: Antologi Pemikiran Rochmat Wahab*. UNY Press. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=NA0EAAAQBAJ>
- Ziemek, M. (1986). *Pesantren Dalam Perubahan Sosial Terj. Burche B. Soendjojo*. Jakarta: P3M.